

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejatinya tidak ada negara yang tidak menginginkan kesejahteraan terjalin di dalam negerinya. Setiap negara mengupayakan segala hal dengan membuat kebijakan guna mencapai tujuan bersama karena sejatinya negara adalah unit politik yang memiliki otoritas tertinggi atas suatu wilayah dan orang-orang di dalamnya. Sedangkan tidak bisa dipungkiri bahwa entitas yang bersatu membentuk suatu negara ini memungkinkan untuk memiliki sejarah yang berbeda-beda, begitu pula dengan Tiongkok yang dikenal sebagai negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan memiliki budaya melimpah.

Tiongkok adalah negara yang memiliki sejarah multikulturalisme lebih dari 5000 tahun (Hu, 2021, p. 474). Tetapi meskipun budaya beragam sudah ada di Tiongkok sejak dahulu, mereka memiliki pandangan dunia sendiri, metodologi, nilai-nilai gaya hidup, praktik budaya, dan bahkan pakaian dan bahasa kelompok masing-masing. Hubungan antara budaya-budaya seringkali mengalami pasang surut karena banyaknya etnis di Tiongkok. Ada yang saling bertentangan dan kesenjangan menjadi salah satu faktor terjadi pergesekkan antar etnis.

Sejak 1950-an, pemerintah Tiongkok telah secara resmi mengakui 55 etnis minoritas dan mendefinisikan identitas etnis masing-masing warga negara (MFA.gov.cn, 1999). Tiongkok saat ini memiliki 5 daerah otonom: Guangxi, Mongolia Dalam, Ningxia, Tibet, dan Xinjiang. Jumlah penduduk nasional adalah

1.411,78 juta jiwa, meningkat sebesar 72,06 juta jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 1.339,72 juta jiwa (data Sensus Penduduk Nasional VI), naik sebesar 5,38 persen. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata adalah 0,53 persen, turun sebesar 0,04 poin persentase dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 0,57 persen dari tahun 2000 hingga 2010 (Jizhe, 2021).

Data menunjukkan bahwa populasi Tiongkok mempertahankan momentum pertumbuhan yang ringan dalam dekade terakhir. Karakteristik distribusi geografis populasi etnis minoritas menunjukkan bahwa hubungan etnis memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap persatuan nasional Tiongkok, stabilitas sosial, perkembangan ekonomi, kemakmuran budaya, dan hubungan internasional (Zhou, 2021). Mempelajari perubahan populasi berbagai kelompok etnis Tiongkok dari perspektif demografis adalah salah satu cara paling penting untuk memeriksa status quo hubungan etnis Tiongkok dan tren pembangunan.

Dalam penelitian ini secara garis besar membahas apa yang terjadi pada etnis Uighur. Etnis Uighur adalah keturunan klan Turki yang hidup di Asia Tengah, terutama di propinsi Tiongkok, Xinjiang. Etnis Uighur merupakan etnis minoritas di Tiongkok tetapi, merupakan penduduk yang paling banyak tinggal di Xinjiang. Etnis Uighur telah tinggal di Uighuristan lebih dari 2.000 tahun lalu, kemudian Tiongkok mengklaim daerah tersebut sebagai warisan sejarahnya dan oleh karenanya tak dapat dipisahkan dari Tiongkok (USC US-China Institute, 2019). Daerah ini berbatasan dengan Kazakstan, Mongolia di timur laut,

Kirghiztan dan Tajikistan di barat laut, dan dengan Afghanistan-Pakistan di barat daya.

Tanah Xinjiang yang merupakan tempat mayoritas etnis Uighur tinggal merupakan daerah yang kaya akan sejarah. Di awal abad ke-20, melalui ekspedisi keilmuan dan arkelogis di wilayah Jalur Sutra, ditemukan peninggalan kuno bangsa Uighur berupa candi-candi, reruntuhan biara, lukisan dinding, dan barang-barang lainnya, juga buku dan dokumen. Kebanyakan karya sastra awal keberadaan Uighur diterjemahkan dalam teks agama Budha dan Manichean. Namun ada juga karya naratif, puisi, dan epik yang telah diterjemahkan ke bahasa Jerman, Inggris dan Rusia. Bangsa Uighur juga dikenal ahli pengobatan. Zaman Dinasti Sung (906-960), seorang ahli obat-obatan Uighur bernama Nanto mengembara ke Tiongkok. Ia membawa berbagai jenis obat yang saat itu belum dikenal di Tiongkok. Bangsa ini pada masa itu itu telah mengenal 103 tumbuan obat dan dicatat dalam buku obat-obatan Tiongkok oleh Shi-zhen Li (1518-1593), (Ariefyanto, 2012). Dengan penjabaran diatas dapat terlihat bahwa sejarah etnis Uighur begitu panjang bahkan sebelum bergabung dengan Tiongkok, bahkan wilayah tersebut masih menyimpan banyak potensi yang mungkin untuk digali lebih dalam.

Wilayah Xinjiang dijadikan sebagai wilayah otonom sejak tahun 1955 yang seiring perkembangannya menjadi tempat ketegangan antara dua suku besar yaitu etnis Han dan etnis Uighur. Satu tahun setelah pemberontakan Tibet pada 2008, diperkirakan 1.000 warga Uighur berkumpul di ibukota regional Urumqi untuk menyerukan penyelidikan pemerintah terhadap perkelahian di sebuah pabrik

mainan di Guangdong, yang menewaskan dua warga Uighur (Hurd, 2018). Setelah peristiwa ini terjadilah kerusuhan hingga pemerintah Tiongkok merespon dengan memblokir akses internet ke daerah itu selama sepuluh bulan (Harrison, 2009).

Konflik yang menerpa etnis Uighur tidak hanya sampai disitu saja. Tepatnya pada tahun 2014, di Tiongkok, terjadi konflik yang ternyata pelakunya adalah sekelompok separatis Uighur. Mereka memprakarsai serangan di stasiun kereta api Kunming, menikam 33 warga sipil (Hurd, 2018). Pemerintah daerah Xinjiang merespon dengan lebih keras, memunculkan kampanye baru "*Strike Hard Against Violent Extremism*" yang dirancang untuk mengerahkan kontrol yang lebih besar terhadap penduduk Uighur. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa Tindakan tersebut untuk menghapus identitas asli yang melekat pada mereka sehingga dengan demikian menghilangkan kemungkinan bagi beberapa bagian dari mereka yang menginginkan kemerdekaan. Sejak peristiwa tersebut, jumlah penangkapan di wilayah ini meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode lima tahun sebelumnya.

Program "*Strike Hard Against Violent Extremism*" meningkat secara dramatis pada tahun 2016, ketika Sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo mengambil alih kepemimpinan Xinjiang. Chen pindah ke Xinjiang dari Daerah Otonomi Tibet, di mana ia memimpin tindakan keras Tiongkok terhadap orang-orang Tibet dan Buddhisme Tibet. Di bawah Chen, anggaran keamanan publik Xinjiang hampir dua kali lipat pada 2017 pada tingkat yang hampir delapan kali lebih tinggi dari anggaran keamanan publik nasional untuk seluruh Tiongkok.

Sebagai bukti betapa Tiongkok sangat menghargai karyanya, Xi Jinping mempromosikan Chen Quanguo ke Politbiro Tiongkok untuk menjadikannya salah satu dari dua puluh lima orang paling kuat di Tiongkok (Buckley, 2018).

Tiongkok telah melakukan beberapa upaya untuk memberikan pembenaran hukum domestik untuk tindakan yang mereka lakukan terutama dengan memungkinkan pemerintah untuk membingkai upaya-upayanya terhadap penduduk Uighur dalam bahasa kontraterorisme. Undang-undang Anti-Terrorisme mulai berlaku pada Januari 2016, tak lama setelah adopsi serangkaian undang-undang keamanan nasional tambahan. Otoritas regional di Xinjiang memperkenalkan seperangkat peraturan komprehensif yang secara formal melarang individu mengenakan cadar dan jenggot panjang, menggeneralisasi konsep halal untuk diterapkan di luar daging, dan menolak barang publik, seperti televisi.

Tiongkok menyangkal bahwa mereka telah memaksa warga Uighur dengan mengatakan bahwa kamp-kamp ini sebagai pusat “*redukasi*” seperti yang dikatakan oleh Duta Besar Tiongkok untuk Inggris, Liu Xiaoming bahwa langkah-langkah pendidikan dan pelatihan yang diambil oleh pemerintah lokal Xinjiang tidak hanya secara efektif mencegah infiltrasi ekstremisme agama dan membantu mereka yang hilang dalam ide-ide ekstremis untuk menemukan jalan mereka kembali tetapi juga memberi mereka pelatihan kerja untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tetapi, pernyataan tersebut kontras dengan pernyataan tahanan yang keluar dari kamp-kamp tersebut (MFA.gov.cn, 2020).

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tidak melakukan tindakan apapun sampai organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia, setidaknya berjumlah 16 organisasi mendesak Dewan HAM (Hak Asasi Manusia) PBB atas isu pemenjaraan masal sekitar satu juta warga etnis Uighur dan Muslim Turki di provinsi Xinjiang, Tiongkok. Isu ini pertama mengemuka pada Agustus 2018 ketika Komite PBB bagi Pembrantasan Diskriminasi mengkaji catatan HAM Tiongkok (Peter, 2021).

Kelompok-kelompok HAM melaporkan orang-orang di kamp itu dihadapkan pada indoktrinasi politik yang dipaksakan, dipaksa melepaskan agama mereka, dan seringkali diperlakukan secara buruk, dan dalam beberapa kasus bahkan disiksa. Mereka mengatakan, tahanan tidak boleh berhubungan dengan keluarga, tidak diberi akses kepada pengacara serta ditahan tanpa kejelasan sampai kapan. Kumi Naidoo sebagai sekjen dari *Amnesty International* menyebut Xinjiang sebagai sebuah penjara besar mengatakan disana dilakukan pengintaian dengan teknologi canggih, indoktrinasi politik, asimilasi budaya yang dipaksakan, penahanan semena-mena, dan penghilangan orang.

Resolusi yang diusulkan akan mendesak Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengirim misi pencarian fakta untuk menilai situasi dan melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada sesi berikutnya. Resolusi itu juga harus menyambut ungkapan keinginan Tiongkok untuk mengizinkan akses oleh para ahli internasional, dan menekankan bahwa akses tersebut harus independen, tidak terbatas, dan tanpa pengawasan. Tiongkok juga harus

diingatkan tentang kewajibannya sebagai anggota *Human Right Council* untuk menegakkan standar tertinggi hak asasi manusi dan sepenuhnya bekerja sama.

Situasi di Xinjiang yang kacau setelah diberlakukan kebijakan *Strike Hard* dan konflik-konflik yang muncul karena adanya kamp reedukasi menarik perhatian penulis untuk menjadikan kasus ini sebagai subjek penelitian. Melihat dari perbedaan perspektif serta pro-kontra yang ada dari pemerintah maupun masyarakat etnis Uighur bahkan negara-negara diluar Tiongkok. Amerika Serikat, Inggris, serta PBB sampai menunjukkan reaksi sampai berulang kali mengkritik Tiongkok atas tindakannya di Xinjiang. Sedangkan negara-negara muslim sebagian besar menghindari pembahasan mengenai situasi yang terjadi di wilayah Xinjiang. Diperkirakan karena negara-negara muslim tidak ingin ikut campur mengenai situasi yang terjadi mengingat diluar kedaulatan negaranya dan ada kecenderungan bahwa mereka takut akan pembalasan ekonomi Tiongkok. Atau seperti Arab yang tidak ingin berkomentar karena negaranya bahkan melakukan hal yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Tiongkok kepada warganya bahkan memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk. Tetapi kesadaran akan pelakuan tidak adil dan tidak seharusnya dilakukan oleh negara yang berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya perlu untuk ditingkarkan sehingga jika kebijakan yang dibuat negara sampai melanggar hak asasi manusia rakyatnya. Tindakan nyata perlu untuk dilakukan untuk menghentikan Tindakan keras yang berpotensi menimbulkan korban lebih banyak.

Topik penelitian ini menarik bagi penulis melihat fenomena menarik mengenai eskalasi yang meningkat antara etnis Uighur dengan Pemerintah

Tiongkok, dimana sebenarnya konflik bekepanjangan sudah berlangsung lama tetapi selalu meluap dan mereda seiring berjalannya waktu juga seiring dengan kebijakan yang diberlakukan atau pemimpin yang menjabat. Lalu pada masa pemerintahan Xi Jinping ketegangan meningkat yang membuat penulis pada akhirnya memilih kejadian ini untuk dicari tahu lebih lanjut. Mengenai apa yang menjadi pemicu terjadinya ketegangan lagi sampai Tiongkok perlu membuat kebijakan-kebijakan untuk menangani situasi tersebut. Kebijakan yang dibuat untuk etnis Uighur yaitu *Strike Hard Against Extremist Terrorism* dan *Camp Reeducation*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, “Mengapa Tiongkok memberlakukan kebijakan *Strike Hard* dan *Reeducation Camp* terhadap suku Uighur di Xinjiang tahun 2014-2019?”

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk dari apa yang dijabarkan sebelumnya maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

1.3.1.1. Menjelaskan tentang gambaran penerapan kebijakan *Strike Hard Against Extremist Terrorism*.

1.3.1.2. Menjelaskan tentang Kamp Reeducasi yang diterapkan pada etnis Uighur.

1.3.2. Tujuan Khusus

- 1.3.2.1. Menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari pengambilan keputusan Tiongkok terhadap etnis Uighur menggunakan Teori Decision Making.
- 1.3.2.2. menjelaskan alasan Tiongkok menindak keras etnis Uighur dengan menggunakan konsep keamanan nasional menurut Tiongkok.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Akademis

Penelitian ini berfokus situasi yang sebenarnya terjadi di Xinjiang terutama pada etnis Uighur yang merupakan etnis minoritas di Tiongkok. Sehingga memberikan penjabaran lebih lanjut, lalu diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan dan akademis mengenai situasi yang sebenarnya terjadi. Pemahaman mengenai alasan rasional Tiongkok mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan *Strike Hard Against Extremist Terrorism* dan *Camp Reeducation*.

1.4.2. Praktis

Dari segi manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi evaluasi dan masukan terkait situasi yang terjadi pada etnis Uighur. Penulis berharap dengan adanya penelitian diharapkan agar Pemerintah Tiongkok dapat mempertimbangkan lagi penerapan kebijakan serupa di masa depan sehingga mengurangi kerugian atau ketidakadilan yang mungkin telah terjadi di situasi ini.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan salah satu hal mendasar atau komponen penting dalam negara. Pendefinisianannya tidak ada yang tetap tetapi memiliki secara garis besar adalah untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu negara. Tentunya meliputi berbagai aspek seperti politik, ekonomi, militer dan sebagainya. Dalam kebijakan pertahanan Tiongkok tercatat bahwa secara tegas Tiongkok menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan sebagai tujuan fundamental pertahanan nasional Tiongkok di era baru (*Defense Policy*, n.d.).

Tiongkok mengejar kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif (*Defense Policy*, n.d.). Sejak diperkenalkannya reformasi, Tiongkok telah berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dunia. Tiongkok telah tumbuh dari negara miskin dan lemah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia tidak dengan menerima pemberian dari orang lain atau dengan terlibat dalam ekspansi militer atau penjarahan kolonial. Namun, itu berkembang melalui kerja keras rakyatnya dan upayanya untuk menjaga perdamaian. Tiongkok telah melakukan segala upaya untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangannya melalui pemeliharaan perdamaian dunia, dan sama-sama berusaha untuk mempromosikan perdamaian dunia melalui pembangunannya sendiri (*Defense Policy*, n.d.). Pembangunan pertahanan nasional Tiongkok bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keamanannya yang sah dan berkontribusi pada pertumbuhan kekuatan perdamaian dunia (*Defense Policy*, n.d.).

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menerapkan konsep ini pada situasi yang terjadi antara Tiongkok dengan kebijakan yang dibuatnya terhadap etnis Uighur. Penulis akan mencari komponen apa saja yang mendasari kepentingan nasional Tiongkok sehingga dapat diketahui pertimbangan dari bagaimana kebijakan terhadap etnis Uighur diambil. Keamanan nasional setiap negara berbeda serta Tiongkok sendiri mempertimbangkan tiga faktor dalam keamanan nasionalnya: kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan (Defense Policy, n.d.).

1.5.2. *Decision Making Theory*

Graham T Allison dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis* membahas mengenai model aktor rasional, pembuatan keputusan digambarkan sebagai suatu proses intelektual dimana pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu negara, alternatif-alternatif juga perlu disiapkan sebagai pertimbangan karena semua keputusan berdasarkan pada untung rugi (Allison, 1999). Model rasional aktor merupakan model pertama yang dikemukakan oleh Graham T. Allison. Inti-inti konsep didalam model rasional aktor terdiri dari empat inti konsep: tujuan dan sasaran, alternatif, konsekuensi, dan pilihan (Allison, 1999). Yang mana empat faktor ini yang akan membantu menjawab pertanyaan penulis.

Tujuan merupakan komponen pertama dalam teori ini. Dalam mengambil keputusan, aktor akan menggolongkan pilihan-pilihan yang ada berdasarkan nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya ada alternatif, aktor rasional akan

memilih dari alternatif untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi (Allison, 1999). Dari pilihan yang diambil berdasarkan alternatif, maka dihasilkan konsekuensi. Setiap alternatif yang ada memiliki konsekuensi yang muncul apabila alternatif tersebut dilakukan. Dan komponen terakhir merupakan pilihan. Pilihan adalah keputusan akhir rasional yang diambil dengan memilih alternatif yang memiliki konsekuensi untuk mencapai keuntungan. Rasionalitas merujuk pada pengambilan pilihan yang mendatangkan keuntungan terbesar. Sehingga, aktor yang terlibat dapat memprediksi tindakan aktor lain dengan mempertimbangkan: pilihan yang masuk akal berkaitan dengan keuntungan terbesar dan aktor yang rasional (Allison, 1999).

1.6. Definisi Konseptual

1.6.1 Decision Making Theory

Decision Making Theory dalam buku Allison dibagi menjadi tiga model lalu penulis akan menfokuskan pada penggunaan rasional aktor. Dalam bukunya, Allison menyajikan tentang pengendalian dan penanganan krisis di dalam pemerintahan juga mengenai banyak faktor yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan ada empat elemen didalamnya yang dapat digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan penulis (Allison, 1999).

1.6.2 Keamanan Nasional

Keamanan nasional adalah kemampuan pemerintah suatu negara untuk melindungi warga negaranya, ekonominya, dan institusi lainnya. Pada awalnya keamanan nasional hanya sebatas perlindungan negara terhadap serangan militer

lalu pada abad-21 cakupannya meluas menjadi beberapa misi non-militer (Longley, National Security Definition and Examples, 2021).

1.7. Definisi Operasional

1.7.1. *Decision Making Theory*

Decision Making Theory merupakan teori yang akan membantu penulis dalam menjawab pertanyaan yang ada dalam skripsi. Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan *Decision Making Theory* dari Graham T. Allison dan jika harus dikerucutkan lagi, penulis menggunakan model pertama yaitu model rasional aktor. Ada empat elemen yang dapat membantu penulis membantu menjawab pengambilan keputusan berdasarkan rasional aktor yaitu, tujuan, sasaran, konsekuensi, dan pilihan (Allison, 1999).

1.7.2. Keamanan Nasional

Pendefinisian mengenai keamanan setiap negara bergantung pada berdasarkan kepentingan negaranya masing-masing. Begitu juga dengan Tiongkok yang keamanan nasionalnya bergeser bergantung pada siapa yang memimpin. Prospek keamanan nasional Xi Jinping dibangun di atas warisan para pemimpin sebelumnya. Tetapi, konsep Xi Jinping tentang keamanan nasional yang secara resmi diperkenalkan pada tahun 2014 terdiri dari 16 arena keamanan yang dianggap penting untuk pembangunan Tiongkok dan kelangsungan hidup negara partai dengan menjaga stabilitas domestik Tiongkok (President Xi Jinping's holistic view of national security Guides China-Afghanistan Security Cooperation to a New High, 2021).

1.8. Argumen Penelitian

Kebijakan *Strike Hard* sudah diterapkan Tiongkok sejak pemimpin-pemimpin sebelumnya. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Xi Jinping kebijakan *Strike Hard* kembali diberlakukan untuk menghilangkan aksi teror yang jumlahnya meningkat diawal pemerintahannya. Kejadian yang memicu diterapkannya kebijakan *Strike Hard* adalah aksi teror pada tahun 2014 yang menewaskan warga Tiongkok dan memberikan kecemasan untuk masyarakat Tiongkok sehingga diterapkannya *Strike Hard* memiliki tujuan untuk menekan aksi teror dan mengembalikan keamanan di wilayah Tiongkok. Presiden Xi Jinping dalam beberapa *speech* mengatakan bahwa pemerintahannya akan berfokus dalam menjaga keamanan negara Tiongkok. Dalam bentuk menjaga keamanan dan ambisi membasmi teror yang ada di dalam negeri dibuat kamp reedukasi untuk mendidik masyarakat yang dianggap mengancam keamanan dan kedamaian Tiongkok. Kebijakan *Strike Hard Against Extremist Terrorism* diterapkan untuk wilayah Xinjiang karena pelaku teror berasal dari etnis Uighur yang merupakan mayoritas penduduk Xinjiang.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif dirasa tepat untuk digunakan oleh peneliti karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan alasan dibalik sebuah tindakan pengambilan kebijakan politik suatu negara. Dalam prosesnya, penelitian kualitatif seringkali menggunakan teori untuk menjelaskan perilaku atau sikap – sikap tertentu (Cresswell 2013, p. 93). Inti dari metode

analisis kualitatif adalah bagaimana peneliti mendeskripsikan sebuah fenomena, mengklasifikasikannya dan melihat bagaimana konsep – konsep yang digunakan saling terhubung (Dey, 1993, p. 31).

1.9.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi pustaka berbasis dokumen. Jenis dokumen yang akan digunakan oleh peneliti sendiri merupakan jenis dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang merupakan interpretasi dari fakta yang ada mengenai suatu fenomena atau peristiwa. Sedangkan dokumen sekunder adalah jenis dokumen yang diperoleh oleh orang – orang atau pihak yang tidak hadir pada saat suatu fenomena atau peristiwa terjadi, namun menerima informasi tentang fenomena atau peristiwa tersebut (Bakry, 2016, p. 172).

1.9.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah salah satu metode dalam teknik analisis kualitatif, yakni metode analisis kongruen. Karakteristik dari metode tersebut yakni peneliti mencoba untuk menjelaskan suatu kasus dengan sebuah teori yang dirasa mampu untuk menjelaskan kasus tersebut (George & Bennet 2005). Dapat dikatakan bahwa teknik analisis ini dapat digunakan sebagai alat untuk menyortir data yang telah diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian.